KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

INDONESIA MEDICAL COUNCIL

Nomor : UM.01.02/02/KKI/III/0741 /2021 9 Maret 2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Undangan Narasumber

Yth. Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
di Jakarta

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pertemuan Rapat Koordinasi Nasional Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2021 dengan tema **"Optimalisasi Peran KKI dalam Era Disrupsi Global"**, bersama ini kami mohon kesediaan Saudara untuk menjadi narasumber pada:

hari : Selasa

tanggal : 30 Maret 2021

waktu : Sesuai jadwal terlampir

materi : Potensi malpraktik dokter/dokter gigi di era disrupsi *industry revolution 4.0 in Health System*

tempat : Hotel Santika Premiere ICE BSD City, Tangerang
Jalan BSD Grand Boulevard, Pagedangan,
Kec. Pagedangan, Tangerang, Banten 15339

Atau melalui aplikasi *zoom meeting* di tautan http://bit.ly/RegistrasiRakornasKKI2021

Terlampir kami sampaikan kerangka acuan dan jadwal pertemuan. Atas perhatian dan kesediaan Saudara untuk hadir, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA KETUA

dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM

JADWAL RAPAT KOORDINASI NASIONAL
OPTIMALISASI PERAN KKI DALAM ERA DISRUPSI GLOBAL
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
TANGGAL 29-31 MARET 2021
TANGERANG, BANTEN

WAKTU (WIB)	KEGIATAN	PEMBICARA	PENANGGUNG JAWAB
Senin, 29 Maret 2021			
14.00 – 17.00	Registrasi dan *Check in*		Panitia
17.00 – 18.30	Ishoma		
18.30 – 21.00	Rakor Internal KKI		
Selasa, 30 Maret 2021			
07.30 – 08.30	Persiapan Pembukaan		Panitia
	PEMBUKAAN		MC : Febriyolla KS & Dody
08.30 – 08.35	Menyanyikan Lagu "Indonesia Raya"	Sekretariat KKI	
08.35 – 08.40	Pembacaan Doa	Dr. Drs. Agus Syamsudin, MSc	Dirigen : Dea
08.40 – 08.45	Laporan Panitia	Ketua Panitia	
08.45 – 09.00	Sambutan Ketua KKI :	dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD, FINASIM	Pembaca Doa (cad) : Syahroni
09.00 – 09.15	*Keynote Speech*	Menteri Kesehatan	
09.15 – 09.25	Pembukaan secara resmi Rapat Koordinasi Nasional dengan tema "Optimalisasi Peran KKI dalam Disrupsi Global"	Menteri Kesehatan didampingi Ketua Konsil Kedokteran Indonesia	
	Penandatanganan Kerjasama KKI dengan Pemda DKI Jakarta dan Pemda Kota Depok	Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Wali Kota Depok dan Ketua KKI	
	Foto Bersama		
09.25 – 09.40	***Press conference*** Rehat kopi		Panitia
09.30 – 11.30	**PANEL SESI 1:**		
	Tema: Kerja sama dalam perwujudan Praktik Kedokteran berstandar global dalam era industri 4.0		Moderator: Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, PhD
09.30 - 10.00	1. *Sharing experience of Malaysian Dental Council and dental practice in Malaysia*	Prof. Dato Dr. Mohamed Ibrahim Abu Hassan (*Malaysian Dental Council*)	
10.00 - 10.30	2. Penguatan Interoperabilitas antar *stakeholder* dalam pelayanan kesehatan	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Aplikasi Informatika)	
10.30 - 11.00	3. Penertiban praktik kedokteran dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan pada masyarakat	Kementerian Dalam Negeri (Menteri)	
11.00 - 11.30	4. Pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi era disrupsi global: - Aturan, pendayagunaan dokter spesialis dan dokter subspesialis, pelayanan *telemedicine*	Kementerian Kesehatan (Dirjen Pelayanan Kesehatan)	
11.30 - 12.00	5. Pendidikan dan Praktik Kedokteran di Era Disrupsi Global	Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U (K)	
12.00 – 13.00	**ISHOMA**		**Panitia**
13.00 – 15.00	**PANEL SESI 2:**		
	Tema: Penjaminan mutu praktik kedokteran		Moderator: Prof. Intan Ahmad M, PhD
13.00 - 13.30	1. Regulasi yang berkaitan dengan adaptasi WNI LLN/ Diaspora - Regulasi moratorium FK	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Pendidikan Tinggi)	

13.30 - 14.00	2. Penguatan peran Kemenkumham pada semua pemangku kepentingan Subjudul: Peran Kemenkumham khususnya direktorat imigrasi sebagai pintu masuk dokter WNA terkait proyek strategis nasional.	Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen imigrasi)	
14.00 - 14.30	3. Potensi wisata kesehatan di era *industry 4.0* Subjudul: Tujuan Indonesia menjadi destinasi wisata kesehatan (program dengan Kemenkes dan *stakeholder* terkait dan kemajuan yang telah dicapai)	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menteri)	
14.30 - 15.00	4. Potensi malpraktik dokter/dokter gigi di era disrupsi revolusi *industry revolution 4.0 in Health System* (contoh kasus dapat disampaikan juga)	Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia	
15.00 – 17.00	Penyusunan rangkuman Rakornas		
Rabu, 31 Maret 2021			
08.30 – 10.00	Kesimpulan dan kesepakatan		Tim persidangan
10.30 - 11.00	Penutupan	Ketua KKI	Panitia

**KETERANGAN : Jadwal tentative*

KERANGKA ACUAN
RAPAT KOORDINASI NASIONAL KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI)
"OPTIMALISASI PERAN KKI DALAM ERA DISRUPSI GLOBAL"

I. Latar Belakang

Kesehatan sebagai "hak asasi manusia" harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Kesehatan mempunyai peran strategis dalam pembangunan bangsa. Selain itu, kesehatan juga merupakan unsur penting dalam ketahanan Nasional dan modal utama kelangsungan pembangunan Nasional.

Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai upaya kesehatan, harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi. Keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, pembinaan, pengawasan. Pemantauan penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bermutu, aman bagi pasien dan memiliki daya saing di era global.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, **Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dibentuk untuk melindungi masyarakat, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis, serta memberikan kepastian hukum bagi dokter, dokter gigi dan masyarakat. KKI mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan terhadap dokter dan dokter gigi WNI/ WNA yang menjalankan praktik kedokteran di Indonesia.** Dokter/dokter spesialis dan dokter gigi/dokter gigi spesialis WNI/ WNA harus terregistrasi di KKI dan dilakukan pembinaan bersama dengan organisasi profesi. Selanjutnya, guna menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran dibentuk oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebagai lembaga otonom dari KKI.

Pelayanan medis/kedokteran yang bermutu dan aman tentu menjadi harapan bagi masyarakat terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis. Sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa Pemerintah Pusat, KKI, Pemerintah Daerah dan Organisasi Profesi wajib membina serta mengawasi praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi WNI/WNA sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Pada era global, seluruh negara atau bangsa mengalami saling ketergantungan satu sama lain dalam semua aspek kehidupan. Saling ketergantungan tersebut, misalnya dalam interaksi ekonomi, sosial, politik dan kesehatan. Dalam bidang Kesehatan, masyarakat dunia mengalami saling ketergantungan yang sangat kuat dalam pelayanan kedokteran. Hal ini menjadikan KKI memiliki peran strategis sebagai regulator praktik kedokteran berstandar global untuk terwujudnya profesionalisme dokter dan dokter gigi di Indonesia yang melindungi masyarakat

Disrupsi adalah suatu perubahan di mana merupakan suatu keniscayaan. Dalam kehidupan pasti terjadi perubahan, pergantian, pembaharuan dan terkadang begitu cepat terjadi. Demikian juga bidang pendidikan dan pelayanan Kesehatan, harus

mampu berlari cepat menjawab tuntutan kebutuhan pada masyarakat yang terus berkembang. Pada era disrupsi, dituntut untuk tetap mengikuti aturan, dengan demikian regulasi yang ada perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Untuk dapat menjalankan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, KKI mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik dalam meningkatkan mutu pelayanan medis. Semua tugas, fungsi serta wewenang tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila harmonisasi antara *pemangku kepentingan* dapat terselenggara dengan baik. Era disrupsi akan sangat tergantung pada "Komunikasi, Kolaborasi serta Integritas" di antara KKI dengan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga mampu dilaksanakan bersama penerima jasa kesehatan dengan satu tujuan demi kepentingan masyarakat Indonesia.

Untuk mengoptimalkan peran Pemerintah, Lembaga/ institusi, organisasi profesi dalam menjamin pelayanan kesehatan yang baik dan aman untuk masyarakat, perlu dilakukan Rapat Koordinasi Nasional dengan tema Optimalisasi Peran KKI Dalam Disrupsi Global.

II. Tujuan

Tujuan Rakornas: Terciptanya Kolaborasi, Komunikasi dan Integritas antar pemangku kepentingan guna terwujudnya perlindungan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan (*Patient Safety*).

III. Luaran/*Outcome*

Melalui pertemuan Rakornas ini diharapkan :

1. Tersusunnya konsep sinergitas KKI dengan pemangku kepentingan di bidang kedokteran dalam meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan medis untuk perlindungan masyarakat.
2. Menghasilkan rekomendasi di antara para pemangku kepentingan dalam menghadapi era disrupsi untuk menghasilkan luaran optimal dalam melayani Kesehatan masyarakat.
3. Mampu menjawab tantangan perubahan dalam bidang Kesehatan dari hulu hilir nya.
4. KKI mampu mengikuti tantangan perubahan *Industry Revolution 4.0 in Health System.*
5. Proposal program masing-masing divisi 2021 - 2022.

IV. Materi Pertemuan

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Penguatan Interoperabilitas antar *stakeholder* dalam pelayanan kesehatan

2. Kementerian Dalam Negeri

Penertiban praktik kedokteran dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan pada masyarakat

3. **Kementerian Kesehatan**
   a. Pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi era disrupsi global: Aturan, pendayagunaan dokter spesialis dan dokter subspesialis, pelayanan *telemedicine*
4. **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**
   a. Regulasi yang berkaitan dengan adaptasi WNI LLN/Diaspora
   b. Regulasi moratorium FK
5. **Kementerian Hukum dan HAM**
   a. Penguatan peran Kemenkumham pada semua pemangku kepentingan
   b. Peran Kemenkumham, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pintu masuk dokter WNA terkait proyek strategis nasional.
6. **Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
   a. Implementasi wisata kesehatan di era disrupsi *industry 4.0* i*n Health System*
   b. Tujuan Indonesia menjadi destinasi wisata kesehatan (program dengan Kemenkes dan pemangku kepentingan terkait dan kemajuan yang telah dicapai)
7. **Ketua KKI**
   Harapan KKI ke depan
8. **Ketua MKDKI**
   Potensi malpraktik dokter/dokter gigi di era disrupsi revolusi *industry revolution 4.0 in Health System*
9. ***Sharing Sessions***
   a. Mengundang Konsil Kedokteran Malaysia (Prof. Dato Dr. Mohamed Ibrahim Abu Hassan)
   b. Mengundang pakar membahas Pendidikan dan Praktik Kedokteran di Era Disrupsi Global (Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U (K))

V. Waktu dan Tempat

Hari/tanggal : Senin s.d. Rabu, tanggal 29 s.d. 31 Maret 2021
Tempat : Hotel Santika Premiere, ICE BSD City, Tangerang

VI. Peserta

Rakornas akan diselenggarakan oleh KKI secara *online* atau biasa disebut dalam jaringan (daring) melalui *zoom meeting* dengan kapasitas 1000 orang dan secara *offline* atau biasa dikenal dengan luar jaringan (luring) dengan peserta sekitar 150 orang, terdiri dari:

1. Konsil Kedokteran Indonesia
2. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
3. Kementerian Kesehatan
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Kementerian Dalam Negeri
6. Kementerian Hukum dan HAM
7. Kementerian Komunikasi dan Informatika
8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

9. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
11. Pemerintah Daerah Kota Depok
12. Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia
13. Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Seluruh Indonesia
15. Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi Seluruh Indonesia
16. Organisasi Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi Seluruh Indonesia
17. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia
18. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia
19. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI)
20. Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI)
21. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI)
22. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI)
23. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI)
24. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia (ARSGMPI)
25. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia (ARSVI)
26. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA)
27. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI)
28. Kepala Pusat Kesehatan Tentara Nasional Indonesia
29. Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat
30. Kepala Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut
31. Kepala Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara
32. Kepala Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut
33. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara RI
34. Direktur Kesehatan Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
35. Kepala Kesehatan Komando Daerah Militer Jaya
36. Sekretariat KKI
37. Peserta lokal (25 orang)

VII. *Keynote Speaker*

Menteri Kesehatan RI

VIII. Narasumber

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. Kementerian Dalam Negeri
3. Kementerian Kesehatan
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7. Ketua KKI
8. Ketua MKDKI
9. *Sharing sessions*:
   a. Prof. Dato Dr. Mohamed Ibrahim Abu Hassan (*Malaysian Dental Council*)
   b. Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U(K)

IX. Metode Pertemuan

1. Paparan narasumber
2. Diskusi Pengorganisasian

Dilaksanakan oleh Tim Panitia sesuai Keputusan Ketua KKI Nomor: 6/KKI/KEP/II/2021 tentang Tim Penyelenggaraan Pertemuan Nasional Konsil Kedokteran Indonesia

X. Pembiayaan

Seluruh biaya Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional KKI, akan dibebankan pada DIPA Sekretariat KKI Tahun Anggaran 2021.

SURAT TUGAS

No : .....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menugaskan yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Sebagai Narasumber dalam Pertemuan Rapat Koordinasi Nasional Konsil Kedokteran Indonesia dengan tema **"Optimalisasi Peran KKI dalam Era Disrupsi Global"** di Hotel Santika Premiere, ICE BSD City, Tangerang pada tanggal 29 s.d. 31 Maret 2021.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

.....,.....

(Pimpinan Institusi)

.....

Ketentuan :

1. Surat Tugas dibuat/salin sesuai dengan format di atas
2. Surat Tugas ditandatangani oleh pimpinan institusi dan distempel
3. Surat Tugas dibuat di atas kertas berlambangkan institusi yang bersangkutan (kop surat instansi)
4. Surat Tugas diserahkan kepada panitia pada saat registrasi.

Potensi Pelanggaran Disiplin Profesi Dokter pada Era Disrupsi Revolusi Industri 4.0 Sistem Kesehatan#

(Industrial Revolution 4.0 in Healthcare Systems)

Dody Firmanda
Ketua
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)
2016 - 2021

Disampaikan pada Pertemuan Rapat Koordinasi Nasional Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2021 "Optimalisasi Peran KKI dalam Era Disrupsi Global" di Hotel Santika Premiere ICE BSD City Tangerang Banten, 30 Maret 2021.

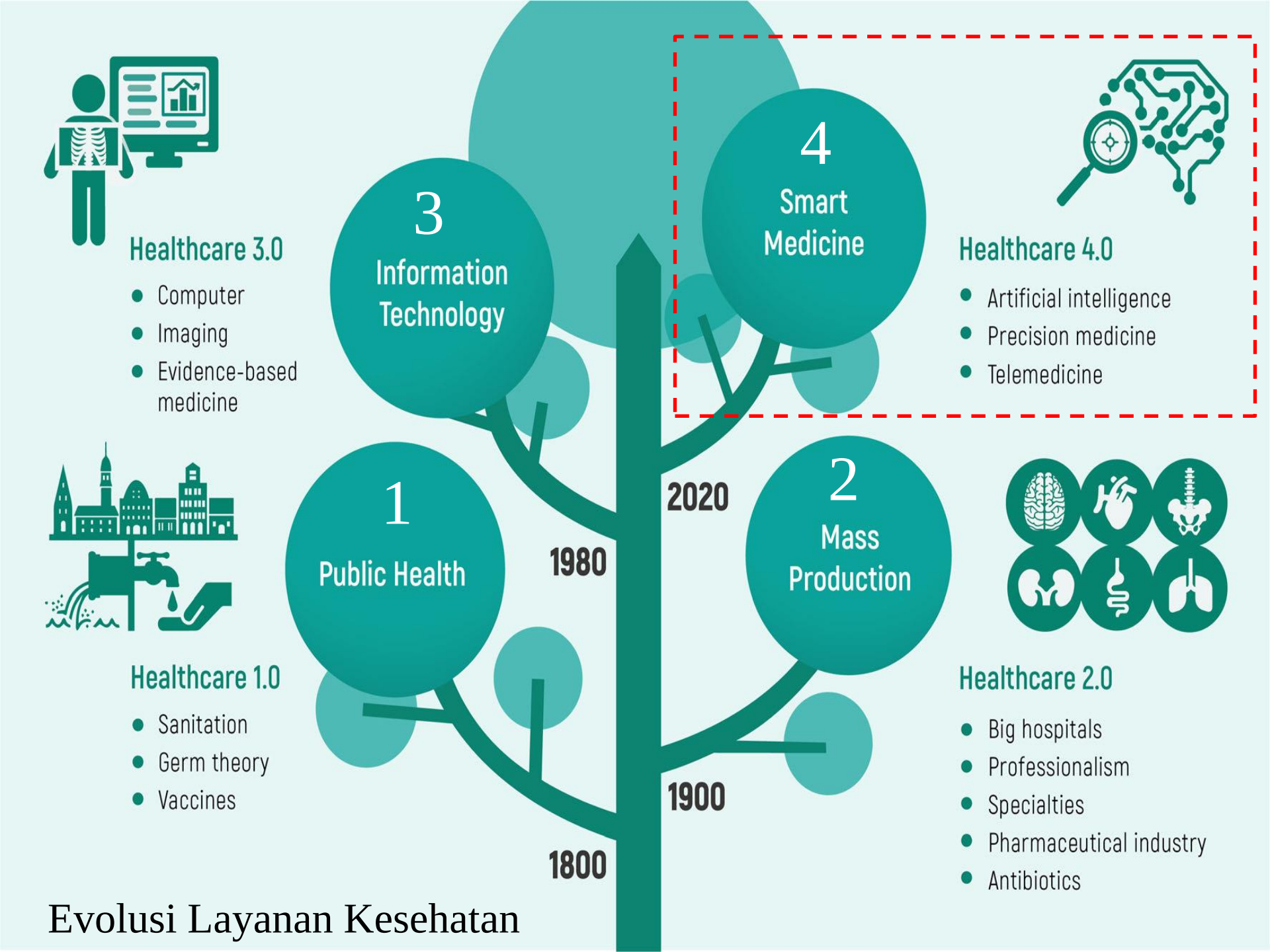

Evolusi Layanan Kesehatan

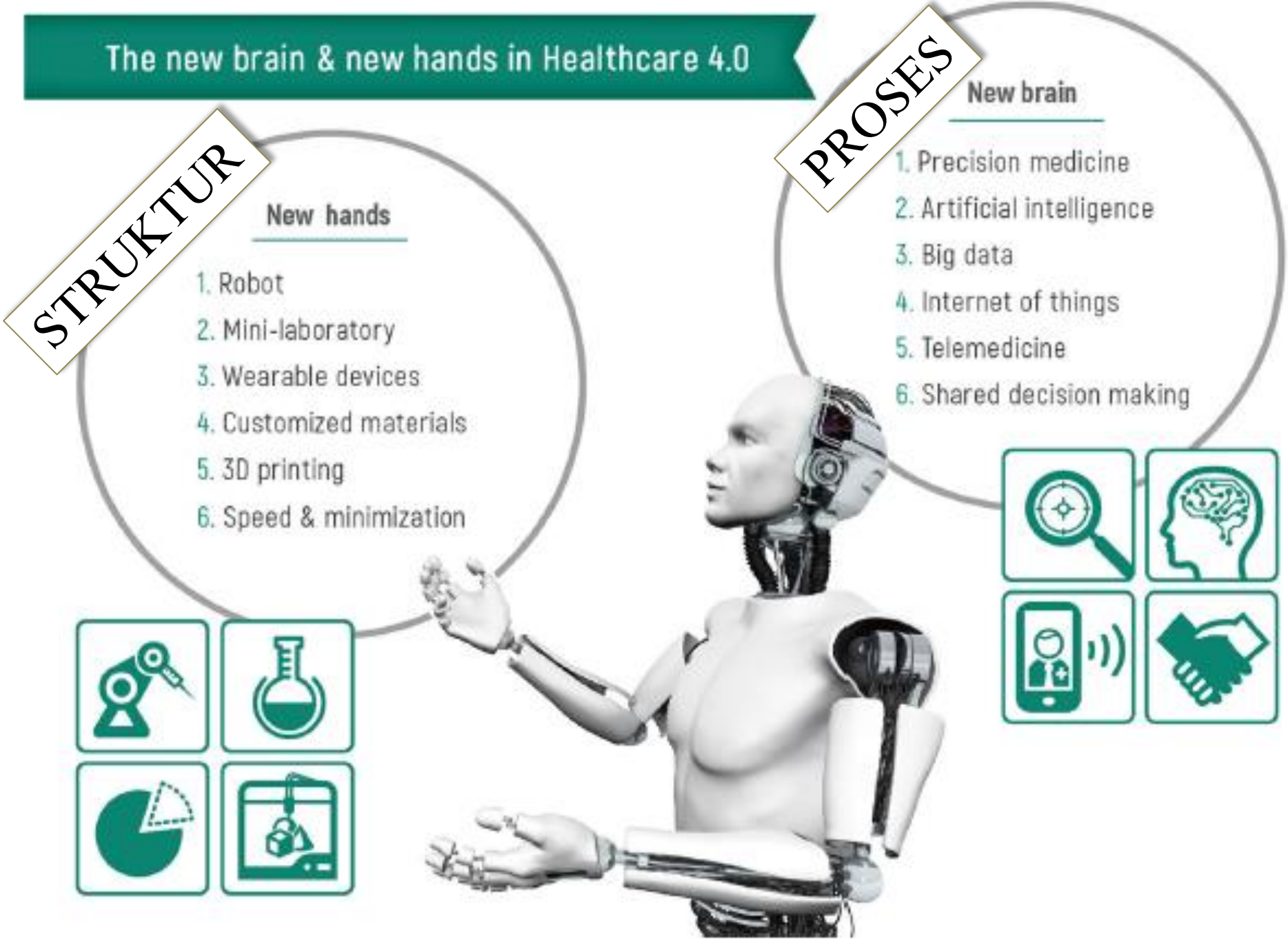
The new brain & new hands in Healthcare 4.0
STRUKTUR
New hands
1. Robot
2. Mini-laboratory
3. Wearable devices
4. Customized materials
5. 3D printing
6. Speed & minimization
PROSES
New brain
1. Precision medicine
2. Artificial intelligence
3. Big data
4. Internet of things
5. Telemedicine
6. Shared decision making

KUNCI:

KONSEP:

INFORMATICS

INTELLIGENCE

COMMUNICATION

STANDARDS

TECHNOLOGY

MANAGEMENT

STRUKTUR:

INFORMATION

RELIABILITY

MODEL:

RELIABILITY

VALIDITY

EXPLICITNESS

CP

CRAVE

COMPARABILITY

ACCEPTABILITY

"Comparative Effectiveness dari HTA

"Critical Appraisals" dari EBM/EBHC

Sistem Kesehatan Nasional

1. Kebijakan*(Policy)*

2. Pembiayaan *(Finance/Budget)*

Regulasi
- Kemenkes
- BPOM

Reimburse
(Klaim)
- JKN/BPJS
- INA CBGs/DRGs
- CCM

Layanan
- (Tempat)
- (Profesi)
- (Waktu)
- (Cara)

NATIONAL HEALTH ACCOUNTS (NHA)

HEALTH NEED ASSESSMENTS (HNA)

UUPK 29/2004
Medical Act 1858, 1983
GMC UK
1. Protecting the people
2. Guiding the doctors
3. Empowering the professions

3. Layanan *(Services)*

HTA

INPUT → PROSES → OUPUT → IMPACT

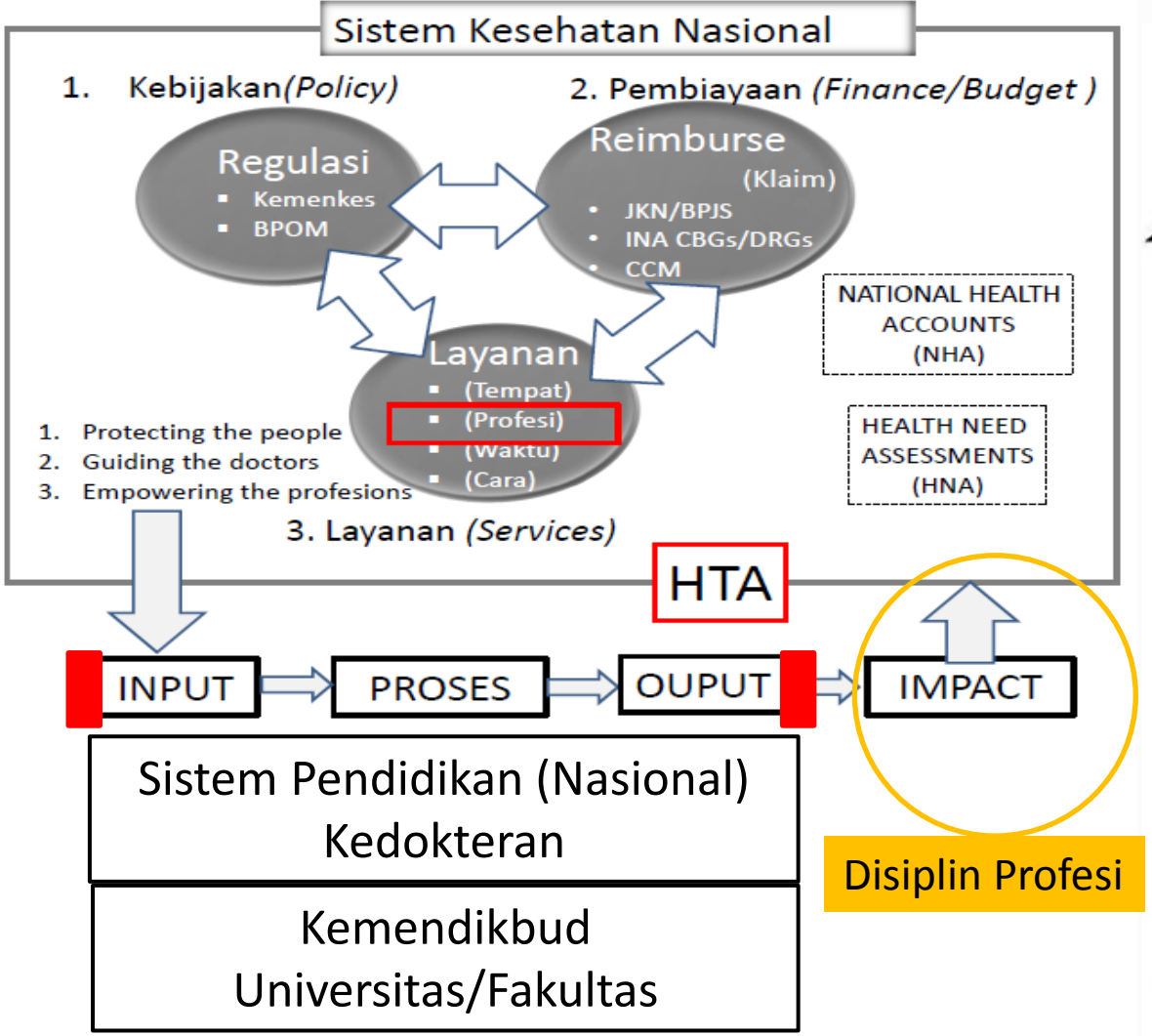

- Mengesahkan Standar Pendidikan
- Registrasi STR

POTENSI PELANGGARAN: Healthcare 4.0

STRUKTUR

Latent Errors

New hands

1. Robot
2. Mini-laboratory
3. Wearable devices
4. Customized materials
5. 3D printing
6. Speed & minimization

PROSES

Active Errors

New brain

1. Precision medicine
2. Artificial intelligence
3. Big data
4. Internet of things
5. Telemedicine
6. Shared decision making

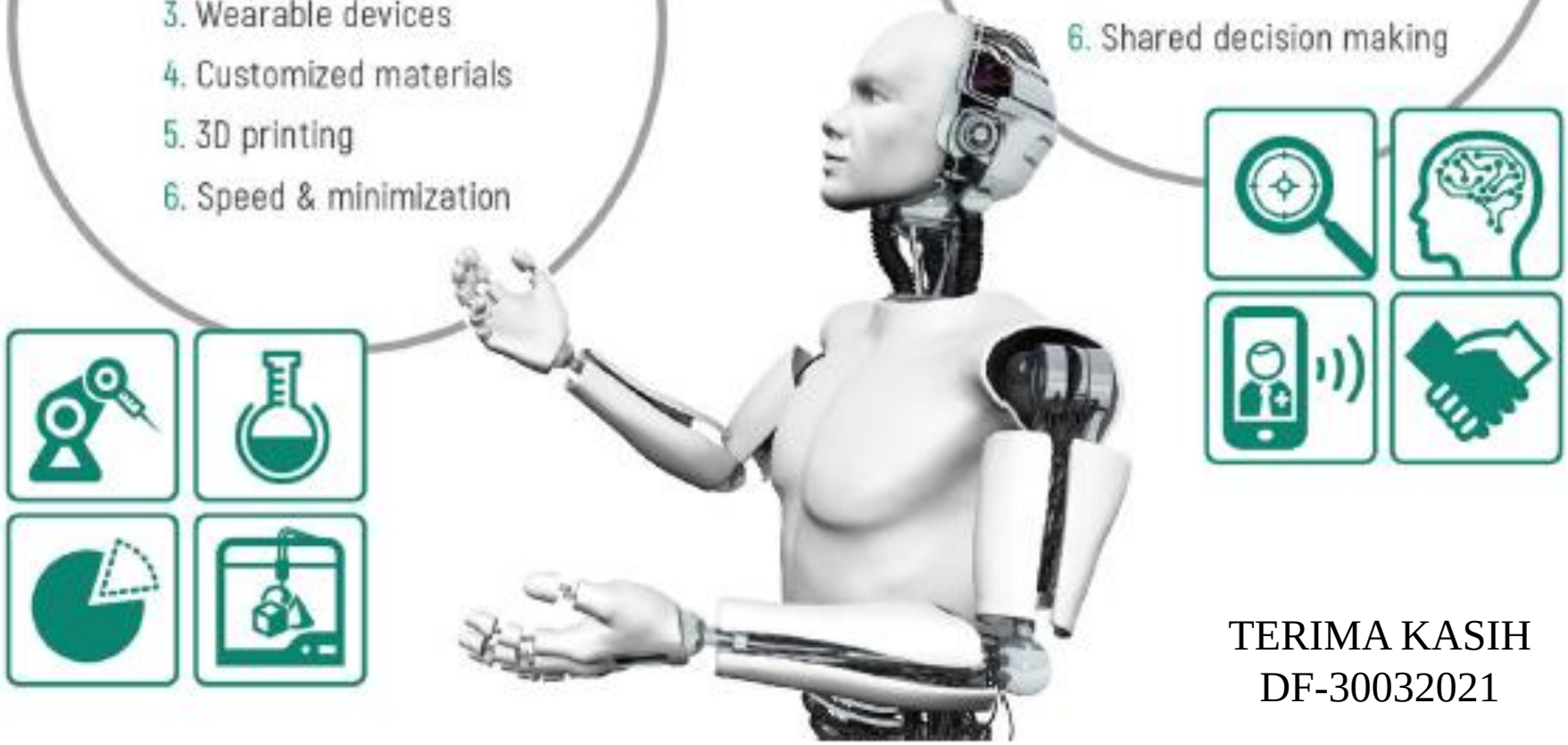

TERIMA KASIH
DF-30032021